



## **Bahasa, Identitas, dan Perlawanan Perempuan sebagai Agen Transformasi Kultural**

### *Language, Identity, and Women's Resistance as Agents of Cultural Transformation*

Dwi Astuti Wahyu Nurhayati

*Tadris Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,  
Indonesia*

*e-mail* : [dwiastuti507@gmail.com](mailto:dwiastuti507@gmail.com) / [dwi.astuti@uinsatu.ac.id](mailto:dwi.astuti@uinsatu.ac.id)

#### **Abstrak**

Rezim Orde Baru, perempuan dibatasi perannya dalam ruang domestik melalui ideologi negara seperti "State Ibuism" yang menguatkan citra perempuan sebagai istri dan ibu yang patuh. Namun, dalam keterbatasan tersebut, perempuan justru melakukan resistensi melalui strategi halus yang tidak frontal, memanfaatkan bahasa, komunitas sosial, dan kepemimpinan alternatif sebagai alat perjuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus historis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa perempuan memanfaatkan bahasa sebagai alat resistensi simbolik, membentuk identitas resistif, serta menciptakan wacana tandingan terhadap narasi negara yang menindas. Mereka juga menggunakan media sosial, seni, dan jaringan komunitas untuk memperjuangkan hak, menyuarakan pengalaman yang disenyapkan, dan mendorong perubahan sosial secara kultural. Bahasa dan komunikasi terbukti menjadi alat penting dalam memperluas ruang kuasa perempuan dan membongkar norma patriarki yang mengekang.

**Kata Kunci:** Perempuan; Bahasa; Perlawanan Simbolik; Komunikasi

#### **Abstract**

*Under the New Order regime, women's roles were confined to the domestic sphere through state ideologies such as "State Ibuism," which reinforced the image of women as obedient wives and mothers. However, within these limitations, women enacted resistance through subtle, non-confrontational strategies utilizing language, social communities, and alternative leadership as tools of struggle. This study employs a descriptive qualitative approach with a historical case study method. Data were collected through in-depth interviews, limited participant observation, and document analysis. The findings show that women used language as a tool of symbolic resistance, constructed resistive identities, and created counter-discourses against the oppressive state narrative. They also utilized social media, art, and community networks to advocate for their rights, voice silenced experiences, and push for cultural and social change. Language and communication proved to be vital instruments in expanding women's agency and dismantling patriarchal norms.*

**Keywords:** Women; Language; Symbolic Resistance; Communication

## PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah Indonesia, perempuan tidak pernah sepenuhnya absen dari proses perubahan sosial. Namun demikian, keterlibatan mereka dalam dinamika sosial-politik sering kali terpinggirkan dari narasi arus utama, terutama pada masa sebelum Reformasi 1998 (Pradita, 2020). Pada era Orde Baru, negara memiliki kendali kuat atas ruang publik, termasuk wacana mengenai peran dan posisi perempuan. Dalam konteks ini, perempuan dikonstruksikan secara ideologis sebagai sosok yang tunduk, domestik, dan pendukung stabilitas rumah tangga serta negara, melalui berbagai program negara seperti Dharma Wanita dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Akbar, 2021). Kebijakan negara ini secara sistemik mengekang ruang ekspresi perempuan, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun kultural (Ino Sulistiani, 2024).

Identitas perempuan dibentuk dalam kerangka "kodrat" yang mempersempit peluang mereka untuk terlibat aktif dalam ranah publik (Nasta & Aditya, 2022). Meski demikian, ruang-ruang terbatas yang tersedia tidak serta-merta membuat perempuan menjadi subjek yang pasif. Justru dalam keterbatasan tersebut, perempuan menunjukkan bentuk-bentuk perlawanan simbolik dan kultural yang halus, tidak frontal, tetapi sangat bermakna (Rodiana et al., 2025). Salah satu instrumen utama yang digunakan perempuan dalam menjalankan perlawanan tersebut adalah bahasa. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai medan perjuangan ideologis dan kultural (Mailani et al., 2022).

Perempuan memanfaatkan gaya bahasa yang empatik, akrab, dan relasional untuk membangun solidaritas, menyampaikan kritik sosial secara terselubung, serta menciptakan ruang aman dan suportif bagi komunitas mereka. Penggunaan metafora, narasi, bahasa daerah, dan ungkapan emosional menjadi strategi diskursif untuk menyampaikan ketidaksepakatan terhadap sistem dominan tanpa harus bersikap konfrontatif (Biegon & Hamdaoui, 2024). Dalam ranah pendidikan, hal ini tercermin dari gaya komunikasi perempuan pendidik yang cenderung santun, terbuka, dan penuh empati, sebagaimana ditunjukkan dalam data observasi pada hari Kamis 9 Januari 2025 (Nurhayati, 2020).

Pendekatan ini tidak hanya menciptakan suasana belajar yang kondusif, tetapi juga menjadi bentuk perlawanan terhadap gaya komunikasi maskulin yang dominatif dan hirarkis (Oktavia & Nurhayati, 2023). Fenomena ini selaras dengan konsep *linguistic capital* dari Pierre Bourdieu, yang memandang bahasa sebagai modal simbolik yang menentukan posisi sosial seseorang (Karman, 2017). Dalam sistem yang bias gender, perempuan menggunakan bahasa sebagai alat untuk menegosiasikan posisi dan memperluas pengaruh mereka (Azmy & Rahman, 2024). Selain itu, konsep *everyday resistance* dari Lilja & Vinthagen, (2018) turut memperkuat bahwa perlawanan tidak harus terjadi dalam bentuk demonstrasi besar, melainkan dapat muncul dalam praktik sosial dan simbolik sehari-hari.

Banyak penelitian sebelumnya turut memperkuat temuan ini. Rahayu & Aprilia, (2018) menunjukkan bahwa perempuan Orde Baru menggunakan jaringan informal sebagai media kritik dan strategi kolektif. Jati, (2014) juga mencatat bahwa dalam konsep *State Ibuism*, perempuan mampu menciptakan ruang negosiasi dan agensi bahkan di tengah tekanan negara. Dengan demikian, penting untuk mereposisi perempuan bukan hanya sebagai korban sistem patriarkal, melainkan sebagai agen transformasi kultural yang aktif dan strategis. Melalui penggunaan bahasa yang cermat dan simbolik, mereka membangun identitas resistif yang merefleksikan pengetahuan sosial, kesadaran politik, serta kapasitas kepemimpinan yang empatik dan berdaya.

## METODOLOGI

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka teoritik sosiologi pengetahuan dan sosiolinguistik kritis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada makna, strategi, dan representasi yang dikonstruksikan oleh perempuan melalui bahasa dalam ruang sosial yang terbatas. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali secara mendalam praktik-praktik bahasa yang digunakan perempuan sebagai bentuk resistensi dalam struktur sosial yang patriarkal, khususnya pada masa sebelum Reformasi 1998. Jenis penelitian ini adalah studi kasus kualitatif historis yang melihat bagaimana perempuan membentuk dan mengartikulasikan identitas serta perlawanan mereka di tengah tekanan struktural rezim Orde Baru, khususnya melalui praktik komunikasi dalam institusi pendidikan dan komunitas sosial (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan di wilayah Jawa Timur, khususnya Tulungagung dan sekitarnya, yang memiliki latar budaya Jawa yang kental. Wilayah ini dipilih karena menjadi lokasi dominan persebaran informan kunci perempuan pada masa Orde Baru. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 4 bulan, dimulai dari Januari hingga Mei 2026.

### Sumber Data

Subjek penelitian adalah para pendidik perempuan (guru dan dosen) yang aktif mengajar sebelum Reformasi 1998, serta pendidik laki-laki sebagai pelengkap triangulasi data. Objek kajian adalah praktik penggunaan bahasa dalam ruang kerja, gaya komunikasi, bentuk interaksi sosial, dan persepsi terhadap posisi gender dalam institusi pendidikan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi agar diperoleh gambaran yang utuh, mendalam, dan representatif mengenai bentuk-bentuk perlawanan simbolik dan kultural yang dilakukan oleh perempuan pada masa sebelum Reformasi 1998, khususnya melalui praktik penggunaan bahasa dalam konteks pendidikan dan komunitas sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan terhadap minimal 10 informan kunci yang terdiri dari pendidik perempuan yang aktif mengajar sebelum Reformasi 1998, beberapa pendidik laki-laki sebagai pembanding perspektif, serta tokoh komunitas lokal yang pernah terlibat dalam kegiatan pendidikan atau organisasi perempuan berbasis masyarakat seperti PKK, Dharma Wanita, pengajian, dan arisan. Wawancara dirancang secara semi-terstruktur dan diarahkan untuk mengeksplorasi pengalaman resistensi simbolik, relasi sosial yang tidak setara, strategi komunikasi yang digunakan perempuan untuk bertahan dan berpengaruh, serta persepsi mereka terhadap perubahan sosial pasca-Reformasi. Selain itu, observasi partisipatif terbatas dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan praktik komunikasi perempuan, baik di dunia pendidikan formal seperti kelas, rapat guru atau dosen, dan seminar, maupun dalam komunitas sosial seperti pertemuan arisan, forum pengajian, dan organisasi Perempuan.

Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah studi dokumentasi, yang digunakan untuk memperoleh data historis dan wacana kebijakan yang membentuk struktur sosial perempuan pra-Reformasi. Dokumen yang dianalisis meliputi arsip kebijakan pemerintah tentang perempuan dan pendidikan pada era Orde Baru, artikel dan edisi majalah perempuan seperti *Kartini*, *Femina*, dan *Gatra Perempuan*, notulensi organisasi perempuan seperti PKK dan Dharma Wanita, serta dokumen internal institusi pendidikan seperti brosur, kurikulum, dan panduan etika



kata "ibu rumah tangga", "istri", dan "kodrat". Namun, di tengah pembatasan tersebut, muncul strategi simbolik yang tersembunyi dalam kata-kata seperti:

- a. "komunitas", "diskusi", "dukungan", dan "solidaritas": mencerminkan bentuk-bentuk jaringan sosial yang dibangun perempuan;
- b. "memilih", "melanjutkan", "memimpin", dan "menentukan sendiri": menunjukkan agensi perempuan dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal pendidikan, jodoh, dan reproduksi;
- c. "wacana", "gagasan", dan "simbolik": mengindikasikan peran penting bahasa dan komunikasi dalam membentuk identitas resistif perempuan.

Kemunculan istilah "reproduksi", "kekerasan", dan "diskriminatif" memperlihatkan bahwa perlawanan tidak hanya bersifat struktural tetapi juga menyasar pengalaman personal yang selama ini disenyapkan, terutama terkait dengan hak atas tubuh, kesehatan reproduksi, dan perlakuan tidak adil di lingkungan rumah dan sekolah. Kata "strategi", "program", "dokumentasi", dan "informal" menyiratkan bahwa perlawanan dilakukan melalui cara-cara non-formal dan kreatif, seperti penggunaan media komunitas, seni, dan dokumentasi pengalaman perempuan, untuk menciptakan wacana tandingan terhadap narasi dominan negara. Pada masa sebelum Reformasi 1998, ruang gerak perempuan Indonesia sangat dibatasi oleh sistem sosial dan politik yang patriarkal.

Negara Orde Baru membentuk citra perempuan dalam kerangka domestik, yaitu sebagai istri yang setia dan ibu rumah tangga yang berbakti. Namun, dalam keterbatasan itulah muncul bentuk-bentuk perlawanan simbolik dan kultural yang dilakukan secara halus, namun berdampak besar. Perempuan tidak hanya bertahan, tetapi juga menolak dan menegosiasikan ulang posisi mereka dalam masyarakat. Mereka memperjuangkan hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk dalam pendidikan, pernikahan, reproduksi, serta melalui partisipasi aktif dalam organisasi dan gerakan sosial. Dalam lintasan sejarah Indonesia, perempuan tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga aktor penting dalam proses perubahan sosial. Namun, perjuangan mereka untuk mendapatkan ruang, pengakuan, dan hak sering kali harus dilakukan dalam senyap terutama sebelum Reformasi 1998.

Masa Orde Baru ditandai oleh kuatnya kontrol negara atas wacana publik dan kehidupan sosial-politik masyarakat. Dalam konteks ini, perempuan ditempatkan dalam posisi yang subordinat, dipaksa untuk tunduk pada peran domestik, dan dibingkai dalam ideologi negara yang dikenal sebagai "*State Ibuism*". Pada saat itu, program-program seperti Dharma Wanita dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) menjadi alat ideologis untuk membentuk citra ideal perempuan sebagai pendukung suami, ibu rumah tangga yang setia, dan penjaga moral keluarga. Perempuan didorong untuk menjadi pelengkap laki-laki, bukan pemimpin, bukan pengambil keputusan, dan bukan subjek aktif dalam pembangunan bangsa. Namun, dalam diam, perempuan melakukan perlawanan simbolik dan kultural.

Mereka tidak turun ke jalan dengan poster-poster protes, tetapi mereka memilih pendidikan, menentukan jodoh mereka sendiri, memperjuangkan hak atas tubuh mereka, dan mengorganisasi diri dalam komunitas sosial yang menjadi ruang tandingan terhadap dominasi wacana negara. Salah satu bentuk nyata dari perlawanan perempuan adalah keberanian mereka dalam memilih untuk melanjutkan pendidikan, meskipun sering kali mendapat tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar (Sudiana & Artika, 2024). Sebelum Reformasi 1998, perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sering kali dianggap "melawan kodrat".

Banyak keluarga dan komunitas yang menekan anak perempuan untuk segera menikah dan tidak melanjutkan sekolah setelah tingkat dasar atau menengah.

Mereka dianggap “tidak perlu sekolah tinggi”, karena pada akhirnya akan kembali ke dapur. Namun, sebagian perempuan tetap melanjutkan pendidikan dengan segala keterbatasan, termasuk menghadapi stigma, cibiran, bahkan ancaman kehilangan restu keluarga. Di tengah narasi negara yang mendorong perempuan untuk fokus pada rumah tangga, banyak perempuan yang justru berjuang agar bisa mengenyam pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Mereka menolak dikekang oleh norma tradisional yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena hanya akan menjadi istri dan ibu. Pilihan mereka untuk tetap bersekolah atau kuliah merupakan bentuk perlawanan simbolik terhadap hegemoni patriarkal, sekaligus investasi jangka panjang dalam pemberdayaan diri yang ingin membatasi peran perempuan di ruang domestik.

Saat ini, perempuan sudah lebih bebas mengakses pendidikan hingga tingkat tertinggi. Bahkan, banyak perempuan menjadi akademisi, ilmuwan, dan pemimpin pendidikan. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti kesenjangan akses di daerah terpencil, bias kurikulum, serta tanggung jawab ganda antara peran domestik dan profesional. Selain itu, perlawanan juga terlihat dalam hal pemilihan pasangan hidup atau jodoh. Di masa Orde Baru, pernikahan paksa, perjodohan tanpa persetujuan, atau pernikahan karena alasan ekonomi adalah hal yang lazim. Hak perempuan untuk menentukan pasangan sering kali diabaikan. Mereka dianggap tidak memiliki kuasa atas keputusan pernikahan (Desti Murdijana et al., 2019). Bahkan, penolakan terhadap perjodohan bisa berujung pada pengucilan atau kekerasan psikologis.

Banyak perempuan yang menolak praktik perjodohan atau pernikahan paksa yang sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kehendak dan hak mereka sebagai individu. Kaum perempuan mulai berani menyuarakan hak untuk memilih pasangan berdasarkan cinta, kesetaraan, dan kehendak pribadi, bukan karena tekanan keluarga atau kepentingan adat. Keberanian ini, meski tampak pribadi, sebenarnya adalah bentuk perlawanan terhadap tatanan sosial yang menindas otonomi perempuan. Saat ini, perempuan memiliki lebih banyak kebebasan dalam menentukan jodoh. Akan tetapi, tekanan sosial dan budaya masih ada, terutama di komunitas-komunitas tradisional.

Praktik pernikahan anak dan stigma terhadap perempuan lajang masih menjadi masalah yang menghambat kebebasan sejati dalam memilih pasangan. Perempuan juga memperjuangkan hak atas kebebasan reproduksi, termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan reproduksi, serta hak untuk menentukan sendiri apakah ingin memiliki anak atau tidak (Rahmah, 2015). Sebelum Reformasi, wacana tentang tubuh perempuan dan hak reproduksi sangat dibatasi. Program Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan negara, misalnya, sering kali diterapkan secara sepihak kepada perempuan, tanpa memperhatikan hak perempuan untuk memilih metode kontrasepsi atau menolak intervensi medis tertentu. Keperawanan juga menjadi standar moral yang diskriminatif, yang lebih banyak dibebankan pada perempuan.

Di masa itu, isu-isu seperti keperawanan perempuan sering digunakan sebagai alat kontrol sosial, yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek moralitas publik (Nurtjahyo, 2023). Dalam situasi seperti itu, muncul perlawanan melalui diskusi-diskusi kecil, literasi kesehatan reproduksi, dan pembelaan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlawanan terhadap praktik diskriminatif ini menjadi bagian penting dari upaya perempuan membebaskan diri dari kontrol patriarkal terhadap tubuh dan seksualitas mereka. Meski bersifat

terbatas dan tidak terpublikasi luas, ini adalah bentuk nyata resistensi terhadap pengontrolan negara dan masyarakat atas tubuh perempuan.

Masa kini, isu kesehatan reproduksi semakin terbuka dibahas. Perempuan mulai mengakses layanan kesehatan reproduksi yang lebih ramah dan memiliki kesadaran atas tubuhnya sendiri. Namun, tantangan masih ada: stigmatisasi, kebijakan diskriminatif, dan keterbatasan informasi di banyak daerah masih menjadi hambatan struktural. Di luar ranah pribadi, perlawanan perempuan juga berlangsung di ruang komunitas. Mereka mengorganisir diri melalui berbagai organisasi perempuan, yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menantang norma-norma yang menindas. Di tengah tekanan negara, perempuan membentuk ruang-ruang alternatif, seperti arisan, kelompok pengajian, komunitas literasi, dan organisasi perempuan. Organisasi-organisasi ini menjadi ruang aman untuk saling berbagi pengalaman, menyusun strategi, dan memperkuat solidaritas antarsesama perempuan.

Di ruang-ruang inilah mereka berbagi pengetahuan, menyusun strategi sosial, serta menyuarakan gagasan-gagasan kritis tentang ketimpangan yang mereka alami. Salah satu bentuk perlawanan yang efektif adalah menciptakan wacana alternatif yang menantang narasi negara. Jika negara menekankan perempuan sebagai pendukung rumah tangga, maka perempuan menciptakan narasi yang memosisikan mereka sebagai pendidik, pemimpin komunitas, dan penjaga nilai-nilai keadilan sosial. Strategi seperti pendidikan populer, dokumentasi kasus kekerasan, dan riset digunakan untuk mengangkat suara perempuan yang termarginalkan. Hasil dokumentasi ini kemudian menjadi bahan advokasi yang memperkuat posisi perempuan dalam ranah hukum dan kebijakan publik.

Salah satu bentuk perlawanan yang sangat strategis adalah pengembangan wacana alternatif. Jika negara terus mendorong narasi perempuan sebagai pendukung rumah tangga, gerakan perempuan menciptakan narasi tandingan yang menekankan pentingnya kesetaraan, kebebasan memilih, dan penghargaan terhadap peran perempuan di ruang publik. Untuk memperkuat perjuangan mereka, perempuan juga menggunakan pendidikan populer, dokumentasi kasus, dan riset sebagai strategi membangun kesadaran publik (Maulid, 2022). Dengan cara ini, mereka tidak hanya memperjuangkan hak sendiri, tetapi juga mengajak masyarakat luas untuk melihat realitas ketidakadilan yang mereka hadapi. Dokumentasi pengalaman perempuan menjadi bukti penting yang memperlihatkan bagaimana sistem sosial-politik telah merugikan mereka, sekaligus menjadi alat advokasi yang kuat untuk perubahan kebijakan.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menjadi contoh konkret dari perlawanan kultural yang kemudian menjelma menjadi gerakan politik perempuan. Dibentuk pada masa transisi Reformasi, KPI mengusung isu-isu perempuan dalam tuntutan gerakan reformasi. KPI tidak hanya menyoroti krisis ekonomi dan sosial yang berdampak besar terhadap perempuan, tetapi juga menuntut negara untuk mengadopsi perspektif gender dalam setiap kebijakan nasional. Mereka membawa suara perempuan ke ruang-ruang pengambilan keputusan yang selama ini didominasi laki-laki. Hingga kini, KPI dan berbagai organisasi perempuan lainnya terus mendorong perubahan struktural, baik melalui advokasi hukum, pendidikan masyarakat, hingga pendampingan korban kekerasan berbasis gender (Nandasari & Jatiningih, 2022).



Menariknya, kata-kata seperti “berbicara”, “menggunakan”, “menyampaikan”, dan “menciptakan” memperlihatkan praktik aktif perempuan dalam menghadirkan suara mereka sendiri. Mereka tidak sekadar berbicara, tetapi juga membangun pengetahuan alternatif yang dapat melawan struktur dominan. Dalam masyarakat yang didominasi oleh struktur kekuasaan patriarkal, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen ideologis yang membentuk dan mempertahankan ketimpangan sosial. Bahasa tidak sekadar alat komunikasi, bahasa membawa muatan nilai, kuasa, dan representasi sosial tertentu yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Di sinilah peran strategis perempuan muncul, mereka menggunakan bahasa sebagai alat untuk menantang, mendekonstruksi, dan membentuk ulang struktur kekuasaan yang menindas mereka.

Bahasa menjadi senjata yang dapat digunakan oleh kelompok subordinat dalam hal ini, perempuan untuk melakukan perlawanan simbolik dan kultural. Perempuan tidak hanya berbicara untuk didengar, tetapi berbicara untuk mengubah pemahaman, persepsi, posisi sosial, dan bahkan realitas sosial yang dibentuk oleh narasi-narasi dominan. Baik sebelum maupun setelah Reformasi 1998, perempuan di Indonesia telah menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengartikulasikan ketidakadilan, membentuk solidaritas, dan menegosiasikan ruang kuasa dalam masyarakat yang masih sarat ketimpangan gender. Pada masa Orde Baru, negara memegang kontrol penuh atas narasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi “State Ibuism” mbingkai perempuan sebagai makhluk domestik, pendukung laki-laki, ibu rumah tangga yang patuh, serta simbol moralitas keluarga dan negara.

Bahasa negara, melalui program-program seperti Dharma Wanita, PKK, dan media arus utama, secara sistemik menempatkan perempuan dalam posisi pasif. Dalam konteks ini, bahasa publik cenderung maskulin, normatif, dan homogen, dengan penekanan pada keteraturan, kepatuhan, dan stabilitas. Perempuan, jika pun diberi ruang berbicara, hanya dalam kerangka yang dibenarkan oleh negara: berbicara sebagai ibu, istri, dan pelayan rumah tangga. Salah satu strategi perempuan dalam menghadapi bahasa patriarkal adalah dengan menciptakan istilah-istilah baru yang merepresentasikan pengalaman khas mereka melakukan perlawanan simbolik dalam bentuk:

- A. Menamai pengalaman mereka sendiri yang tidak terwakili oleh bahasa negara (misalnya: pelecehan seksual di tempat kerja, kekerasan dalam rumah tangga);
- B. Menggunakan bahasa informal, metafora, dan bahasa daerah dalam komunitas arisan, pengajian, atau kelompok belajar sebagai bentuk komunikasi resistif yang sulit dijangkau aparat negara; dan
- C. Membangun narasi alternatif dalam komunitas, seperti mendidik anak-anak dengan nilai kesetaraan dan empati yang tidak diajarkan dalam kurikulum negara.

Banyak pengalaman perempuan seperti kekerasan seksual, beban ganda, diskriminasi reproduktif, atau pelecehan verbal tidak memiliki tempat dalam kosa kata umum karena selama ini realitas tersebut dianggap tabu atau tidak penting. Dengan menciptakan istilah seperti *sexual harassment* (pelecehan seksual), *mansplaining*, atau *glass ceiling*, perempuan membentuk wacana alternatif yang mampu menjelaskan struktur ketidakadilan yang sebelumnya tidak terucapkan. Ini adalah langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif. Saat ini, perempuan juga telah menguasai berbagai media, baik cetak maupun digital. Bahasa yang digunakan tidak hanya menyampaikan pengalaman personal, tetapi juga mengajak orang lain berpikir, berdiskusi, dan bertindak. Bahasa menjadi alat kolektif, bukan hanya ekspresi individu.

Perempuan juga melakukan perlawanan dengan menolak penggunaan bahasa yang merendahkan atau mengobjektifikasi mereka, seperti istilah generik maskulin dalam bahasa publik, pelabelan negatif terhadap perempuan aktif, atau stereotip dalam media. Penolakan terhadap istilah seperti "perempuan cerewet", "emosional", atau "tidak pantas tampil di ruang publik" adalah bentuk dekonstruksi bahasa yang diskriminatif. Di ruang akademik maupun aktivisme, muncul kesadaran untuk menghindari penggunaan bahasa seksis dan menggantinya dengan bentuk yang inklusif dan setara. Bahasa menjadi media penting bagi perempuan untuk membagikan pengalaman hidup mereka, terutama pengalaman yang selama ini disenyapkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di tempat kerja, atau diskriminasi dalam pendidikan.

Melalui tulisan, pidato, diskusi publik, atau media sosial, perempuan mengubah pengalaman pribadi menjadi isu kolektif dan politis. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita; mereka menjadi alat perjuangan, membangun kesadaran publik, dan menuntut perubahan sosial. Di sinilah bahasa bekerja sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan merebut ruang narasi yang sebelumnya dikuasai laki-laki atau negara. Selama ini gaya bicara perempuan sering dilabeli sebagai "lemah lembut", "tidak logis", atau "terlalu emosional", seolah-olah nilai rasionalitas dan ketegasan hanya milik laki-laki. Dalam konteks ini, banyak perempuan mulai mengubah cara bicara mereka, tidak untuk menyesuaikan diri dengan norma laki-laki, tetapi untuk menegaskan identitas dan otoritas mereka sendiri. Beberapa perempuan menggunakan gaya berbicara yang lugas, tajam, dan penuh argumentasi untuk menuntut ruang. Yang lain tetap menggunakan pendekatan empatik dan relasional, tetapi dengan muatan politis yang kuat.

Cara ini adalah bentuk resistensi terhadap konstruksi bahasa dan komunikasi yang bias gender. Bahasa juga digunakan untuk membangun komunitas dan solidaritas. Perempuan menyusun narasi bersama dalam forum diskusi, organisasi perempuan, atau media sosial untuk menciptakan rasa "kita". Sebuah identitas kolektif yang saling menguatkan. Bahasa menjadi alat membentuk jaringan resistensi yang saling menopang dan berbagi visi perjuangan. Dalam konteks feminisme, misalnya, kata-kata seperti "*sisterhood*", "kesetaraan", dan "*empowerment*" menjadi simbol ikatan solidaritas yang memperkuat gerakan. Salah satu bentuk perlawanan paling penting adalah ketika perempuan mengambil alih kuasa atas narasi tentang dirinya sendiri. Mereka tidak lagi ingin diceritakan oleh media, negara, atau institusi agama dalam cara yang mereduksi, tetapi ingin menjadi narator utama atas kisah hidupnya.

Melalui esai, puisi, biografi, film dokumenter, bahkan konten digital, perempuan menyuarkan versi mereka sendiri tentang menjadi perempuan bukan sebagai korban pasif, melainkan sebagai aktor aktif yang memiliki suara, pilihan, dan pengaruh. Dalam konteks feminisme dan gerakan sosial, penggunaan bahasa adalah bagian tak terpisahkan dari strategi politik. Bahasa digunakan untuk membongkar struktur patriarki, mengkritik hukum yang bias gender, serta mengkampanyekan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesetaraan. Bahasa tidak lagi hanya soal kata, tetapi soal kuasa: siapa yang berhak bicara, siapa yang didengarkan, dan siapa yang menentukan makna. Maka, ketika perempuan menggunakan bahasa untuk menyampaikan realitas mereka, mereka sedang merebut kuasa atas makna sosial.

## Strategi Komunikasi Perempuan sebagai Perlawanan terhadap Dominasi Gender



Gambar 3. Word Cloud Strategi Komunikasi Perempuan sebagai Perlawanan terhadap Dominasi Gender

Sumber : Nvivo12 Pro oleh Dwi Astuti Wahyu Nurhayati, 2025

*Word cloud* ini memvisualisasikan kata-kata kunci yang berhubungan dengan strategi komunikasi yang digunakan oleh perempuan untuk melawan dominasi gender dalam struktur sosial dan lembaga pendidikan. Gambar 3 ini menggambarkan secara utuh bagaimana perempuan mengolah pengalaman mereka menjadi kekuatan resistensi melalui media komunikasi yang beragam baik tradisional, komunitas, hingga digital. Kata “perempuan” muncul paling dominan, menandakan bahwa subjek utama dari resistensi ini adalah perempuan sebagai pelaku aktif, bukan sebagai korban pasif. Sementara itu, kata-kata seperti “komunikasi”, “sosial”, “pengalaman”, dan “ruang” menjadi penghubung makna yang menjelaskan konteks perjuangan. Perempuan mengubah pengalaman personal mereka menjadi bentuk komunikasi publik yang strategis untuk membuka ruang kesadaran sosial, solidaritas, dan advokasi kebijakan.

Kata “strategi”, “membangun”, “melalui”, dan “menyampaikan” menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya alat berbicara, tetapi menjadi metode perlawanan kultural yang terstruktur dan terarah. Perempuan menggunakan komunikasi untuk menyampaikan pengalaman yang selama ini disenyapkan, seperti “pelecehan”, “diskriminasi”, dan “stereotip gender” yang terjadi di ruang pendidikan maupun komunitas. Kata “media”, “digital”, “Instagram”, “@perempuanfeminis”, serta “kampanye” menunjukkan bentuk komunikasi kontemporer yang digunakan perempuan untuk menjangkau khalayak luas. Media sosial menjadi ruang ekspresi baru yang lebih terbuka dan lentur, perempuan dapat berbicara, menyuarakan gagasan, dan membentuk komunitas virtual tanpa batas geografis. Ini memperluas ruang resistensi perempuan dari yang dulunya terbatas pada ranah domestik dan komunitas, menjadi global dan lintas kelas sosial.

Visualisasi ini juga menampilkan istilah “cerita”, “arsip”, “seni”, dan “budaya”, yang menandakan bahwa seni dan narasi personal menjadi alat penting dalam membangun empati dan menyampaikan realitas ketimpangan gender secara simbolik. Dalam konteks lembaga pendidikan, bentuk komunikasi semacam ini menjadi alternatif terhadap sistem formal yang masih sarat bias gender. Kemunculan kata “hak”, “advokasi”, “kuasa”, dan “dominasi” juga menegaskan bahwa strategi komunikasi ini bersifat politis. Perempuan tidak hanya berbagi cerita, tetapi juga

mendorong perubahan struktural dengan memengaruhi opini publik, menekan lembaga, serta menantang dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan.

Komunikasi bukan sekadar sarana pertukaran informasi, tetapi merupakan medium kuasa yang mampu mempengaruhi cara pandang, membentuk struktur sosial, serta menciptakan atau membongkar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam struktur sosial patriarkal yang mengakar kuat di Indonesia, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang tidak setara. Keterbatasan ini tidak hanya terjadi dalam ruang-ruang domestik, tetapi juga tercermin dalam struktur sosial dan lembaga pendidikan yang masih sarat ketimpangan gender yang terus direproduksi lewat bahasa, simbol, dan narasi. Namun, perempuan tidak tinggal diam. Mereka terus mencari dan mengembangkan cara untuk menyuarakan suara, menyampaikan pengalaman, serta memperjuangkan hak-hak mereka.

Salah satu bentuk perlawanan yang paling signifikan dan strategis adalah melalui komunikasi. Dengan menggunakan strategi komunikasi yang beragam dan adaptif, perempuan Indonesia membangun perlawanan terhadap dominasi gender, terutama dalam struktur sosial dan lembaga pendidikan. Perlawanan perempuan melalui komunikasi tidak selalu bersifat frontal atau konfrontatif. Sebaliknya, strategi ini sering kali bersifat simbolik, halus, dan terselubung, tetapi memiliki daya dorong yang kuat dalam membongkar norma-norma patriarki. Komunikasi perempuan berkembang dari sekadar alat ekspresi menjadi alat politik dan budaya. Perempuan membangun strategi komunikasi yang tidak hanya bertujuan menyampaikan pesan, tetapi juga menantang norma dominan, membongkar stereotip, dan menciptakan ruang baru bagi kesetaraan.

Strategi ini mencakup upaya untuk mengubah cara pandang masyarakat, menyuarakan pengalaman yang selama ini disenyapkan, memperjuangkan hak-hak perempuan, serta menciptakan ruang ekspresi baru melalui berbagai medium, mulai dari diskusi komunitas, media sosial, seni, hingga advokasi kebijakan. Strategi ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, diskusi komunitas, seni, pendidikan, hingga advokasi kebijakan. Salah satu tujuan utama komunikasi perempuan adalah untuk mengubah norma dan persepsi sosial yang telah lama menindas dan membatasi ruang gerak mereka. Hal ini dilakukan dengan menyoroti kesadaran kolektif dan membentuk opini publik yang lebih adil terhadap perempuan. Norma-norma ini biasanya dilegitimasi melalui pendidikan, media, agama, dan budaya yang bias gender.

Perempuan kini aktif dalam menyebarkan narasi tandingan terhadap stereotip negatif. Melalui kampanye digital, tagar (#), dan konten edukatif di media sosial, mereka menyampaikan informasi tentang kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, dan peran perempuan dalam ruang publik. Misalnya, penggunaan tagar seperti #TolakPerkosaan, #MeToo, #BersamaPerempuan atau #PerempuanBersuara menjadi medium untuk membuka mata masyarakat terhadap budaya perkosaan dan seksisme yang telah lama dianggap normal. Kampanye ini tidak hanya mengedukasi masyarakat, tetapi juga memicu solidaritas kolektif lintas kelas dan generasi. Narasi baru dikembangkan untuk menantang stereotip. Melalui narasi yang lebih inklusif, perempuan menantang stereotip seperti “perempuan emosional dan tidak rasional”, “tidak cocok menjadi pemimpin”, atau “takdir perempuan hanya di dapur”.

Perempuan-perempuan muda kini membangun citra diri yang mandiri, cerdas, dan progresif melalui konten digital, tulisan, podcast, dan ruang-ruang diskusi. Perempuan kini menunjukkan melalui cerita nyata, karya tulis, dan penampilan publik bahwa mereka mampu menjadi pemimpin, pendidik, aktivis, dan pengambil keputusan. Pengalaman perempuan selama ini sering dianggap

tidak relevan atau bahkan tabu untuk diungkapkan. Strategi komunikasi menjadi penting dalam membuka ruang bagi pengalaman perempuan, yang selama ini dikekang oleh norma sosial dan budaya patriarkal. Komunikasi menjadi alat untuk menyuarakan pengalaman pribadi yang selama ini disenyapkan. Berbagi pengalaman bukan hanya bentuk penyembuhan, tetapi juga upaya politisasi pengalaman perempuan.

Banyak perempuan kini berani membagikan cerita mereka sendiri tentang diskriminasi, pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan dalam akses pendidikan, dan tekanan sosial lainnya. Cerita-cerita ini disampaikan melalui media sosial, blog, zine, podcast, hingga pertunjukan seni. Misalnya, gerakan *@perempuanfeminis* di Instagram menjadi platform di mana perempuan dapat menyuarakan pengalaman mereka, menemukan solidaritas, serta mendapat edukasi tentang hukum dan hak-hak mereka. Cerita ini menjadi bahan refleksi sekaligus alat perlawanan terhadap sistem yang selama ini mengabaikan suara mereka. Pengalaman perempuan juga didokumentasikan secara kolektif oleh lembaga atau organisasi masyarakat sipil sebagai arsip sejarah gerakan perempuan, yang penting untuk advokasi kebijakan di masa depan.

Dokumentasi ini termasuk testimoni korban, studi kasus, hasil survei, dan catatan lapangan. Perempuan menggunakan platform seperti blog, Instagram, dan YouTube untuk mencatat dan menyimpan pengalaman kolektif. Dokumentasi ini penting untuk membentuk gerakan sosial yang berbasis bukti dan pengalaman riil, serta menjadi arsip sejarah perempuan Indonesia. Komunikasi perempuan tidak hanya bergerak di ranah budaya dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan perundang-undangan yang lebih berpihak pada kesetaraan gender. Perempuan terlibat dalam forum diskusi legislatif, seminar, audiensi dengan pemerintah, dan kampanye publik untuk menuntut perubahan hukum yang diskriminatif.

Salah satu keberhasilan besar dari strategi ini adalah disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) setelah perjuangan panjang selama hampir satu dekade oleh kelompok perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil yang tidak lepas dari strategi komunikasi kampanye, diskusi publik, hingga pelibatan media massa. Kerja sama dengan media, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, dan institusi pendidikan memperluas jangkauan pesan dan memperkuat legitimasi perjuangan perempuan. Ini sekaligus membongkar anggapan bahwa perjuangan kesetaraan gender hanya milik kalangan elit atau aktivis. Seni merupakan saluran komunikasi yang unik, karena mampu menyampaikan kritik sosial secara emosional dan simbolik, menjangkau kalangan yang lebih luas tanpa terkesan menggurui.

Melalui teater, film, musik, puisi, dan lukisan, perempuan seniman mengangkat isu-isu seperti pelecehan seksual, pernikahan dini, diskriminasi di sekolah, dan body shaming. Film seperti *Yuni*, *Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak*, serta karya-karya sastra dari penulis seperti Ayu Utami dan Intan Paramaditha menjadi bentuk nyata komunikasi resistif melalui seni. Seni juga menjadi alat untuk menyuarakan identitas perempuan, termasuk identitas budaya, agama, dan kelas. Lewat ekspresi seni, perempuan membangun narasi diri yang independen dan melawan narasi dominan yang cenderung menyepelkan kontribusi perempuan dalam sejarah dan kebudayaan. Melalui seni, perempuan menemukan ruang untuk memperkuat jati diri dan membangun komunitas yang saling mendukung. Ini bukan hanya ekspresi estetis, tetapi juga bentuk penegasan bahwa perempuan memiliki suara, kreativitas, dan kuasa naratif.

Strategi komunikasi perempuan tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang menghubungkan satu sama lain untuk membentuk kekuatan kolektif (Faruq, 2025). Komunikasi

berfungsi sebagai alat untuk membangun jaringan solidaritas dan kerja sama antarperempuan lintas generasi, wilayah, dan latar belakang. Perempuan mendirikan dan bergabung dalam komunitas yang mendukung advokasi gender, seperti KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), SPEAK, JALA PRT, serta komunitas daring seperti @perempuanfeminis di Instagram, menjadi ruang diskusi, edukasi, dan konsolidasi gerakan perempuan lintas daerah. Di komunitas ini, perempuan saling berbagi informasi, pengalaman, bahkan dukungan psikologis dan hukum serta merancang strategi bersama.

Perempuan kini semakin aktif bergabung dalam gerakan sosial yang memperjuangkan isu-isu lintas sektor seperti gerakan lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan demokrasi atau kebebasan pers. Keterlibatan ini memperkuat pengaruh mereka dalam membentuk arah kebijakan dan nilai sosial. Contoh Strategi Nyata di Lapangan meliputi: (1) Komunitas digital seperti @perempuanfeminis, atau @konde.co, menggunakan Instagram, Tiktok, X, dan YouTube untuk menyebarkan edukasi seputar kekerasan gender, undang-undang yang diskriminatif, serta membangun solidaritas perempuan secara luas; (2) LSM dan lembaga pendidikan memberikan pelatihan kepemimpinan, literasi hukum, dan keterampilan komunikasi publik agar perempuan memiliki keberanian dan kapasitas untuk memperjuangkan haknya di ranah formal; dan (3) Buku seperti *Cerita Perempuan*, *Feminist's Guide to Survive Indonesia*, dan film dokumenter lokal menjadi sumber penting untuk menyebarkan perspektif perempuan dan mendorong perubahan budaya Indonesia.

### **Kesimpulan**

Perempuan Indonesia meskipun hidup dalam struktur sosial yang sangat mengekang selama masa Orde Baru, tetapi tidak pernah benar-benar pasif. Di balik narasi dominan yang meminggirkan, perempuan justru mengembangkan bentuk-bentuk perlawanan simbolik dan kultural yang halus namun berpengaruh. Dalam ruang yang terbatas, mereka membangun identitas resistif, memanfaatkan bahasa sebagai alat ideologis, serta membentuk jaringan solidaritas sosial yang menjadi fondasi bagi transformasi kultural. Bahasa menjadi bukan sekadar alat komunikasi, melainkan medan perjuangan dan alat negosiasi sosial. Perempuan menggunakan gaya bahasa yang empatik, relasional, dan menyentuh nilai-nilai lokal untuk membangun pengaruh sosial dan memperluas ruang kuasa mereka. Pilihan diksi, narasi, dan simbol dalam bahasa menjadi cara perempuan melawan dominasi gender tanpa harus melanggar batas yang ditetapkan negara secara terang-terangan.

Strategi komunikasi yang dikembangkan oleh perempuan baik dalam ranah pendidikan, komunitas, maupun budaya menunjukkan bahwa perlawanan terhadap ketimpangan gender tidak selalu harus bersifat konfrontatif. Justru dalam bentuk-bentuk komunikasi yang simbolik dan kultural, perempuan berhasil menegosiasikan ruang, membongkar norma yang menindas, dan menciptakan makna baru tentang keberdayaan. Bahasa dan komunikasi merupakan instrumen utama untuk membangun kesetaraan dan keadilan sosial. Di tengah tantangan patriarki yang terus beregenerasi dalam bentuk-bentuk baru, strategi resistensi perempuan melalui bahasa dan komunikasi tetap menjadi kunci dalam perjuangan kolektif menuju transformasi sosial. Perempuan bukan hanya sebagai korban dari sistem patriarkal, tetapi sebagai subjek aktif dan strategis dalam perubahan kultural bangsa.



## REFERENSI

- Akbar, M. R. (2021). Representasi Perempuan dalam Rezim Wacana Orde Baru. *Journalism, Public Relation and Media Communication Studies Journal (JPRMEDCOM)*, 3(2), 28–47.
- Azmy, K., & Rahman, F. (2024). *Discourse in Gender Studies : How Language Shapes Gender Narratives ?* 6(1), 25–38.
- Biegon, R., & Hamdaoui, S. (2024). Anti-populism and the Trump trauma in US foreign policy. *International Affairs*, 100(5), 1857–1875.
- Desti Murdijana, Hodijah, S. N., Mukarramah, E., Prawitasari, S. A., Prameswari, D., & Sugiri, raisa nur. (2019). *Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman Bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia*.
- Faruq, M. (2025). *STRATEGI KOMUNIKASI GENDER DALAM*. 8, 1452–1460.
- Ino Sulistiani. (2024). *Representasi Diri Perempuan , Pembungkaman Sebagai Sedikit Fenomena Masalah Gender Dan*. 17(1), 1–20.
- Jati, W. R. (2014). Historisitas Politik Perempuan Indonesia. *Paramita: Historical Studies Journal*, 24(2).
- Karman. (2017). BAHASA DAN KEKUASAAN (Instrumen Simbolik Peraih Kekuasaan Versi Bourdieu). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(2), 235–246.
- Lilja, M., & Vinthagen, S. (2018). Dispersed resistance: unpacking the spectrum and properties of glaring and everyday resistance. *Journal of Political Power*, 11(2), 211–229.
- Mailani, O., Nuraeni, I., Syakila, S. A., & Lazuardi, J. (2022). Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kehidupan Manusia. *Kampret Journal*, 1(1), 1–10.
- Maulid, P. (2022). Analisis Feminisme Liberal terhadap Konsep Pendidikan Perempuan (Studi Komparatif antara Pemikiran Dewi Sartika dan Rahmah El-Yunusiyah). *Jurnal Riset Agama*, 2(2), 305–334.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. SAGE Publication.
- Nandasari, D. C., & Jatningsih, O. (2022). Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Women Crisis Center “Yayasan Harmoni” Jombang. *Journal of Civics and Moral Studies*, 6(2), 64–79.
- Nasta, F. F., & Aditya, I. (2022). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bangku Legislatif Menilik Pada Pengarustamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(19), 104–117.
- Nurhayati, D. A. W. (2020). *Research Methodology*. Akademia Pustaka.
- Nurtjahyo, L. (2023). Tubuhku Bukan Milikku: Pasal 463 KUHP Baru Ditinjau dari Perspektif Hukum Feminis. *Jurnal Perempuan*, 28(1), 1–10.
- Oktavia, N. T., & Nurhayati, D. A. W. (2023). the Use of Book Creator in the Blended Learning Model in Social Studies Learning. *SOLIDARITY: Journal of Social Studies*, 3(1), 33–47.
- Pradita, S. M. (2020). Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19-20 : Tinjauan Historis Peran Perempuan dalam Pendidikan Bangsa The History of the Indonesian Women ' s Movement in the 19-20 Century : A Historical Review of the Role of Women in National Education. *Chronologia: Journal of History Education*, 2(2), 12–24.



- Rahayu, R. I., & Aprilia, I. R. (2018). Rekonstruksi Pemahaman Kebangsaan: Percakapan Tentang Perempuan dan Kebangsaan. *Jurnal Perempuan*, 23(3), 183–192.
- Rahmah, A. (2015). Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. *Aliansi Remaja Independen*, 28(1).
- Rodiana, O., Buana, U., & Karawang, P. (2025). *Tubuh Perempuan sebagai Arena Kuasa : Feodalisme , Kapitalisme , dan Patriarki dalam Goyang Karawang*. April, 0–12.
- Sudiana, I. N., & Artika, I. W. (2024). *ANALISIS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM NOVEL*. 14(2003), 518–539.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (II)*. Alfabeta.